



**LAPORAN KUNJUNGAN SPESIFIK KOMISI II DPR – RI
KE PROVINSI MALUKU
PADA MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2017 – 2018
TANGGAL 19 SEPTEMBER 2017**

I

I

II

II

II

II

II

II

II

II

II

I

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA**

LAPORAN KUNJUNGAN SPESIFIK KOMISI II DPR – RI
KE PROVINSI MALUKU
PADA MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2017 – 2018
TANGGAL 19 SEPTEMBER 2017

.....

I. PENDAHULUAN

A. DASAR KUNJUNGAN SPESIFIK

Komisi II DPR RI telah melakukan kunjungan spesifik dalam rangka evaluasi pelaksanaan pilkada serentak 2017 serta persiapan dan kesiapan pilkada serentak 2018. Komisi II DPR RI melakukan kunjungan ke Kantor Gubernur Provinsi Maluku. Komisi II DPR RI mengadakan pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Maluku, KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi Maluku, serta KPUD dan Panwas Kab/Kota yang akan melaksanakan pilkada serentak 2018 di Provinsi Maluku.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak gelombang ketiga pada 27 Juni 2018. Pilkada diikuti 171 daerah dari tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Daerah yang akan menyelenggarakan pilkada tersebut terdiri atas 17 provinsi dan 154 kabupaten/kota, di mana untuk Provinsi Maluku sendiri terdapat 3 pilkada yaitu 1 pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur serta 2 pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab/Kota. Penyelenggaraan pilkada yang dilakukan secara serentak harus diimbangi dengan kesiapan setiap daerah untuk melaksanakan pilkada serta koordinasi yang terus menerus antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah terkait pencairan dana pilkada, pelaksanaan setiap tahapan pilkada seperti sengketa pencalonan, kampanye, dan debat publik, hingga koordinasi dengan aparat keamanan guna mendeteksi secara dini setiap potensi ancaman keamanan.

Sehubungan dengan hal tersebut, melalui kunjungan kerja ini Komisi II DPR RI sesuai dengan kewenangan yang ada ingin mengetahui secara langsung persiapan yang telah dilakukan sekaligus kesiapan dari KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara dimaksud, baik dalam hal anggaran maupun teknis pelaksanaan. Disamping itu, Komisi II DPR RI juga ingin mendapatkan penjelasan dan informasi terkait hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh KPU dan Bawaslu Provinsi Maluku terkait penyelenggaraan pilkada serentak 2017 termasuk permasalahan-permasalahan yang dihadapi sekaligus mendiskusikan hal-hal yang diperlukan agar penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2018 dapat terselenggara dengan kualitas yang lebih baik.

Tim kunjungan spesifik Komisi II DPR RI ke Provinsi Maluku berjumlah 23 orang anggota . Tim kunjungan kerja di dampingi oleh 1 (satu) tenaga ahli dan 3 (tiga) staf dari Sekretariat Komisi II DPR RI, dan 1 (satu) reporter dari TV Parlemen DPR RI.

B. WAKTU KUNJUNGAN SPESIFIK

Kunjungan Komisi II DPR RI dilaksanakan pada tanggal 19 s/d 21 September 2017. Komisi II DPR RI telah melakukan kunjungan spesifik ke Kantor Gubernur Provinsi Maluku dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi dewan dibidang pengawasan terkait evaluasi pelaksanaan pilkada serentak 2017 serta persiapan dan kesiapan pilkada serentak 2018.

II. HASIL KUNJUNGAN

A. Pemaparan Sekretaris Daerah Provinsi Maluku

- Pelaksanaan Pilkada Serentak 2017

Pada 15 Februari 2017 telah dilaksanakan pilkada serentak pada 5 kabupaten yaitu: Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Buru, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dan Kota Ambon. Pilkada serentak tersebut telah berjalan dengan baik. Hasil akhirnya sebagaimana telah dilantik dalam 2 tahap yaitu:

1. Tahap pertama pada tanggal 22 Mei 2017 melantik Bupati/Wakil Bupati Seram Bagian Barat, Bupati/Wakil Bupati Buru, Bupati/Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat, dan Walikota/Wakil Walikota Ambon.
2. Tahap kedua pada tanggal 8 September 2017 melantik Bupati/Wakil Bupati Maluku Tengah.

Satu permasalahan yang perlu menjadi perhatian adalah menyangkut tugas dan kewenangan gubernur selaku wakil pemerintah pusat di mana salah satu tugas sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 23 Tahun 2014 pada pasal 91 ayat (4) huruf d adalah melantik bupati dan walikota. Permasalahannya terjadi pada aspek pembiayaan, selama ini anggaran digunakan dari APBD padahal dalam pasal 91 ayat (5) menegaskan bahwa dalam melaksanakan tugas gubernur sebagai pemerintah pusat dibiayai dengan APBN. Hal ini berdampak pada administrasi keuangan saat ini dan nanti.

- **Kesiapan Alokasi Anggaran Provinsi Maluku dan 2 Kabupaten/Kota Penyelenggara Pilkada Serentak 2018**

Nama Daerah	Institusi	Anggaran		Rencana Pencairan	
		Usulan	Nilai NPHD	2017	2018
Provinsi Maluku	KPU	385.000.000.000	200.000.000.000		168.000.000.000
	Bawaslu				
Kab. Maluku Tenggara	KPU	25.891.985.086	20.581.015.844		15.401.679.951
	Panwaslu				
Kota Tual	KPU	17.500.000.000	15.000.000.000	2.534.000.000	12.466.000.000
	Panwaslu				

- **Kesiapan KPU Provinsi Maluku**

KPU Provinsi Maluku telah melakukan persiapan untuk menyambut pilkada serentak tahun 2018 meskipun baru saja mengalami kedukaan atas meninggalnya Ketua KPU Provinsi Maluku Bapak Mus Latua Toekan, S.Sos.,M.Si beberapa waktu yang lalu. Oleh Karena itu Pemerintah Provinsi Maluku terus membangun koordinasi dengan 2 kab/kota yang akan melaksanakan pilkada serentak 2018. Beberapa tahapan yang telah difasilitasi, dikoordinasikan, dan didorong untuk dilaksanakan antara lain:

1. Perencanaan, program, dan anggaran

KPU Provinsi Maluku telah melakukan sejumlah pertemuan dengan 2 KPU kab/kota penyelenggara agar mempersiapkan usulan program dan alokasi anggaran pelaksanaan pilkada serentak kepada pemda kab/kota masing-masing. Secara administrasi keuangan kesiapan alokasi anggaran pilkada serentak tahun 2018 untuk KPU kab/kota telah disiapkan sebagaimana NPHD di atas.

2. Sosialisasi, penyuluhan, bimbingan teknis

Sesuai penjadwalan pada PKPU No. 1 Tahun 2017, KPU Provinsi Maluku telah melakukan sosialisasi kesiapan pelaksanaan pilkada serentak 2018 berdasarkan UU No. 10 Tahun 2016 bersama dengan 2 KPU kab/kota sebagai langkah kesiapan bagi penyelenggaraan pilkada serentak 2018 di Provinsi Maluku.

3. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS

Persiapan pembentukan PPK dan PPS telah dikoordinasikan secara baik dan akan dilaksanakan sesuai penjadwalan yang ditetapkan yaitu pada 12 Oktober 2017 s/d 11 November 2017.

4. Studi banding pilkada serentak

KPU Provinsi Maluku telah melakukan studi banding ke beberapa provinsi yang melakukan pilkada serentak tahun 2017 yang lalu.

- **Kesiapan Bawaslu/Panwaslu**

Ketua Bawaslu Provinsi Maluku wafat pada beberapa hari yang lalu. Saat ini jajaran komisioner Bawaslu kosong dan pada tanggal 20 September 2017 telah dilantik 3 komisioner Bawaslu yang baru oleh Bawaslu pusat.

- **Kesiapan Pemerintah Provinsi Maluku**

Biro Pemerintahan Setda Maluku menyediakan alokasi anggaran yang diperuntukkan untuk pelaksanaan monitoring dan pemantauan terhadap tahapan pilkada serentak 2018 pada provinsi dan 2 kab/kota penyelenggara. Alokasi anggaran ini diperuntukkan juga bagi koordinasi pemerintah pusat (Kementerian Dalam Negeri c/q Dirjen Otonomi Daerah) guna melakukan penyesuaian berbagai regulasi terbaru. Biro Pemerintahan Setda Maluku Juga telah mengusulkan alokasi anggaran bagi pembentukan "desk pilkada" sebagaimana yang diperintahkan oleh Menteri Dalam Negeri. Selain itu, proses data pemilih menjadi kewenangan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Maluku. Data pemilih telah sesuai dengan data Ditjen Dukcapil Kemendagri dan dikoordinasikan dengan KPU pusat untuk dijadikan sebagai data awal pemilih.

- **Perkembangan Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Provinsi Maluku**

Kondisi stabilitas keamanan dan ketertiban Provinsi Maluku secara umum sangat kondusif, tidak ada perkembangan isu-isu tertentu yang potensial mengganggu keamanan dan ketertiban umum. Khusus untuk kedua kab/kota penyelenggara, berdasarkan laporan yang masuk tidak ada perkembangan masalah keamanan dan ketertiban masyarakat yang menonjol. Pada tanggal 18 September 2017 Gubernur Maluku telah

melantik Wakil Walikota Tual sisa masa jabatan 2013-2018 dengan demikian diharapkan seluruh penyelenggaraan di Kota Tual berjalan dengan baik. Kondisi Keamanan ini diharapkan dapat terus membaik sampai dengan tahapan-tahapan pilkada 2018. Koordinasi yang baik terus dibangun antara pemerintah daerah, pihak keamanan, dan seluruh elemen masyarakat. Jajaran FORKOPIMDA Maluku khusus Kodam XVI Pattimura dan Polda Maluku selalu berkoordinasi dalam penanganan dinamika stabilitas keamanan dan ketertiban umum.

B. Pemaparan KPU Provinsi Maluku

KPU Provinsi Maluku telah melakukan supervisi dan monitoring di beberapa KPU kabupaten/kota. Kegiatan yang akan dilakukan antara lain: rapat koordinasi penyelenggara pemilu di Maluku, launching pilkada serentak, dan akan meresmikan rumah pintar pemilu. Termasuk di dalamnya kesiapan pemutakhiran data berkelanjutan. Kami sedang menyusun data pemilih terakhir bekerjasama dengan disdukcapil. NPHD sudah ditanda tangani, dilakukan dalam 2 tahap yaitu tahun 2017 dan tahun 2018. Lalu, kami menyusun beberapa pedoman teknis tahapan yang disusun berdasarkan PKPU yang ada (5 pedoman). KPU Provinsi Maluku telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku No: 01/HK.03.1/Kpt/81/Prov/VIII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018.

KPU Provinsi Maluku juga telah membuat tata cara pembentukan kecamatan, pedoman teknis pemutakhiran data pemilih, dan tata cara pencalonan. Pada tanggal 10 September 2017 KPU Provinsi Maluku telah membuat keputusan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilihan umum berjumlah 1.228.958.000 pemilih dengan syarat persentase 10% apabila mengajukan diri menjadi calon perseorangan yang tersebar di 6 kab/kota di Provinsi Maluku. Syarat minimum partai politik/kursi adalah $20\% \times 45 = 9$ kursi dan $25\% \times 958.000 = 254.642.000$ suara sah.

Penyelenggara adhoc (pps/ppk) akan dibentuk pada tanggal 12 oktober 2017 (sesuai jadwal), dalam UU sekurang-kurangnya dibentuk 6 bulan sebelum, calon perseorangan dijadwalkan 9 Oktober 2017, dan penerimaan DP4 dijadwalkan 27 Nov 2017.

Hal lain yang perlu mendapat perhatian anggota Komisi II DPR RI ketika melaakukan RDP dengan Kementerian Dalam Negeri terkait masalah batas wilayah yang menimbulkan potensi konflik dalam pelaksanaan pilkada serentak 2018 yaitu terdapat penduduk yang memiliki e-KTP ganda di Kabupaten Maluku tengah dan Kabupaten Seram Bagian Barat perbatasan antara Kecamatan Leihitu dan Kecamatan Leihitu Barat serta di daerah Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru Selatan.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi KPU Provinsi Maluku tidak terdapat kejadian money politics. Antisipasi money politics dilakukan dengan komitmen bersama antara KPU dan Bawaslu serta melakukan deteksi dini, jika ada temuan maka akan diberikan sanksi yang tegas. Penerimaan PPK dan PPS akan dilakukan secara selektif dengan memberikan pemahaman bahwa penyelenggara tidak terikat dengan kepentingan pasangan calon. Selain itu, seluruh tahapan pilkada di Maluku tepat waktu tidak ada yang tertunda meski ada gugatan di PTUN. Terkait pemilih ganda, KPU Provinsi Maluku sangat berharap agar terjadi tertib administrasi kependudukan dan tertib penyelenggaraan administrasi pemilihan. Perlu adanya antisipasi dan perbaikan dalam proses pembuatan e-KTP agar tidak terdapat e-KTP ganda.

C. Pemaparan KPU dan Panwaslu Kota Tual

KPU Kota Tual sudah membuat keputusan terkait syarat dukungan dan telah menandatangani NPHD untuk penyelenggaraan pilkada di Kota Tual. Hal lain yang perlu diperhatikan untuk kelancaran pelaksanaan pilkada serentak 2018 terkait kondisi geografis Kota Tual yang merupakan wilayah kepulauan. Terdapat 2 kecamatan yang jaraknya cukup jauh serta kesulitan dalam jaringan komunikasi. Kondisi seperti ini membuat KPU Kota Tual mengalami kesulitan untuk melakukan supervisi karena sangat tergantung pada kondisi cuaca. Alat transportasi hanya berupa kapal feri.

Panwaslu Kota Tual sudah menandatangani NPHD namun nilai NPHD Panwaslu Kota Tual merupakan NPHD terkecil di seluruh Indonesia, hanya sekitar 2.5 milyar sehingga ada banyak kegiatan yang harus disesuaikan dengan kondisi anggaran.

D. Pemaparan Walikota Ambon

Penyelenggaraan dan pendidikan demokrasi di Indonesia relatif baik. Indeks demokrasi Indonesia menempatkan Provinsi Maluku pada urutan ke-1. Terkait penanganan e-KTP masalahnya terdapat pada pemerintah pusat. Perekaman e-KTP sudah dilakukan di daerah tetapi e-KTP belum didapatkan oleh masyarakat. Selain itu, banyaknya alat-alat perekaman/sarana prasarana pembuatan e-KTP yang rusak (tidak mendukung) penyelesaian e-KTP.

Walikota Ambon menyampaikan "Laporan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2017" sebagai berikut:

Jumlah penduduk Kota Ambon per 31 Oktober 2016 berjumlah 429.457 jiwa yang tersebar di 5 kecamatan yaitu Kecamatan Sirimau, Kecamatan Nusaniwe,

Kecamatan Baguala, Kecamatan Teluk Ambon, dan Kecamatan Leitimur Selatan. Sedangkan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Ambon berjumlah 237.627 jiwa terdiri dari 114.3349 laki-laki dan 123.278 perempuan yang tersebar di 5 kecamatan di Kota Ambon.

Pemerintah Kota Ambon telah menyiapkan bantuan dana hibah kepada penyelenggara pemilihan walikota dan wakil walikota tahun 2017 dengan penandatanganan NPHD Pemerintah Kota Ambon dengan KPU Kota Ambon, Panwaslu Kota Ambon, Kapolres P. Ambon, dan P.P. Lease serta Kodim 1504 Pulau Ambon. Adanya perubahan perjanjian dana hibah antara Pemerintah Kota Ambon dengan KPU Kota Ambon karena adanya belanja modal untuk pengadaan yang pelaksanaannya oleh Pemerintah Kota Ambon diserahkan kepada KPU Kota Ambon dalam melaksanakan Pilkada 2017. Bantuan dana hibah yang diberikan kepada penyelenggara dibagi dalam 2 tahap pelaksanaan yaitu 1) Tahap I diberikan pada tahun anggaran 2016 2) Tahap II diberikan pada tahun anggaran 2017 (paling lambat 2 Februari 2017).. Berikut tabel jumlah NPHD yang diberikan Pemerintah Kota Ambon.

No.	Penyelenggara Pemilu	Nomor Naskah	Jumlah Dana yang Diberikan
1.	KPU Kota Ambon (4 Mei 2016)	No. 910/243/SETKOT No. 03/KPU KOTA AMBON/V/2016	Rp. 26.454.932.000
2.	KPU Kota Ambon (perubahan NPHD 9 Juni 2016)	No. 917/3257/SETKOT No. 10.a/KPU KOTA AMBON/VI/2016	Rp. 26.126.163.000
3.	Panwaslu Kota Ambon (1 Agustus 2016)	No.917/4446/SETKOT/01/08/2016 No.12/PANWASLU- AMBON/VIII/2016	Rp. 6.713.556.000
4.	Polres P. Ambon dan P.P. Lease (29 Agustus 2016)	No. 281/4963/SETKOT No.13/1298/VIII/2016	Rp. 5.350.333.000
5.	Komando Distrik Militer 1504 Pulau Ambon (28 September 2016)	No. 917/5050/SETKOT No. 8/545/X/2016	Rp. 760.325.000

Kegiatan/tahapan pilkada yang telah dilaksanakan antara lain:

- a. Pendaftaran pasangan calon tanggal 21-23 September 2016. PANTAS, jumlah parpol pengusung 8 yaitu PDIP, Gerindra, Hanura, demokrat, PKS, PBB, PKB, PAN. PAPANISA BARU, jumlah parpol pengusung 3 yaitu Golkar, Nasdem, PPP.
- b. Penelitian terhadap pasangan calon tanggal 23-29 September 2016.

- c. Rapat dalam rangka konfirmasi hasil tes narkoba terhadap paslon tanggal 27 September 2016.
- d. Verifikasi paslon tanggal 5-11 Oktober 2016.
- e. Penetapan paslon di Baileo Siwalima Ambon tanggal 24 Oktober 2016.
- f. Pengundian nomor Urut tanggal 25 Oktober 2016. Paslon No urut 1 PAPARISSA BARU (Richard Louhenapessy, SH dan Syarif Tuasikal, SH). Paslon No. urut 2 PANTAS (Drs. paulus Kastanya, M.Si dan M.A.S. Latuconsina, ST.,MT)
- g. Pembukaan kampanye (deklarasi kampanye damai) tanggal 27 Oktober 2016.
- h. Debat publik I dengan tema “Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat” bertempat di Baileo Siwalima Ambon tanggal 10 Desember 2016.
- i. Kegiatan persiapan LINMAS sebanyak 1.400 orang bertempat di Pattimura Park 17 November 2016 untuk wilayah Kecamatan Sirimau dan Nusaniwe dan Terminal Transit Passo 18 November 2016 untuk wilayah Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Teluk Ambon, dan Leitimur Selatan.
- j. Jumlah TPS di Kota Ambon sebanyak 675 TPS.
- k. Penduduk/pemilih yang belum memiliki KTP kurang lebih 32.000 orang namun sudah terekam dalam database kependudukan Kota Ambon sehingga diberikan surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon.
- l. Persiapan logistik berdasarkan e-katalog untuk Kota Ambon keseluruhan proses pencetakan surat suara dilaksanakan di Surabaya. Tim dari Ambon terdiri dari KPU, Panwaslu, dan Polres.
- m. Data personel KODIM 1504 Pulau Ambon yang terlibat sebagai unsur pengamanan berjumlah 130 personel.
- n. Data personel Polres PP. Ambon dan PP. Lease yang terlibat sebagai unsur pengamanan (TPS, PPS, PPK, KPU Kota, pengamanan mobile sesuai pentahapan dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Tahapan Pilkada	RES Ambon	BKO Polda
1.	Pendaftaran paslon	114	-
2.	Pengumuman perbaikan dokumen	114	173
3.	Penetapan calon	141	173
4.	Pengundian nomor urut	114	-
5.	Kampanye	245	120
6.	Masa tenang	120	120
7.	Pungut hitung	357	499
8.	Rekap hasil di PPK	357	499
9.	Rekap di KPUD	52	86
10.	Penetapan paslon terpilih	120	145
11.	Pelantikan	203	251

- o. Rapat reguler persiapan pilkada Kota Ambon dilaksanakan berturut-turut mulai dari tanggal 13 September 2016 di Kantor Walikota Ambon, 8 Desember 2016 di Convention Hall Maluku Cit Mall Ambon melakukan rapat koordinasi sekaligus sosialisasi persiapan pilkada Kota Ambon 2017 kepada aparat pemerintah kota, 15 November 2016 bertempat di Polres PP. Ambon dan PP. Lease, 8 Desember 2016 di Kantor KPU Kota Ambon, rencana rapat pada tanggal 10 Januari 2017.

2. Pemaparan KPU Kota Ambon

KPU Kota Ambon melakukan upaya pencegahan pelanggaran yang mungkin dilakukan penyelenggara pilkada dengan memasang spanduk yang berisi larangan serta sanksi yang didapatkan bagi penyelenggara pilkada.

3. Pemaparan KPU Kabupaten Maluku Tenggara

KPU Kabupaten Maluku Tenggara telah menandatangani NPHD sebesar 2.5 milyar dan siap melaksanakan pilkada serentak 2018. Setiap kegiatan yang dilakukan KPU Kabupaten Maluku Tenggara disesuaikan dengan PKPU yang ada. Sampai saat ini belum memiliki kendala yang dapat menghalangi penyelenggaraan pilkada serentak nanti.

4. Pemaparan Panwaslu Kabupaten Maluku Tenggara

Panwaslu Kabupaten Maluku Tenggara belum menandatangani NPHD namun sudah ada komunikasi dan kesepakatan jumlah NPHD sekitar 6.8 milyar.

5. Pemaparan Kapolda Provinsi Maluku

Pada tanggal 12 September 2017 Polda Provinsi Maluku telah mengadakan rapat internal guna memberikan arahan kepada Polres dalam rangka persiapan pelaksanaan pilkada serentak 2018. Polda Provinsi Maluku membutuhkan anggaran untuk pelaksanaan pengamanan pilkada serentak sebanyak 101 Milyar. Personel yang akan bertugas sebanyak 4.504 orang yang akan ditempatkan di 2.556 TPS yang ada di Provinsi Maluku. Terdapat 3 kriteria pengamanan yaitu kriteria aman I, kriteria rawan I, dan kriteria rawan II yang pada setiap tahapan pilkada jumlah personel yang ditugaskan disesuaikan dengan kebutuhan serta situasi dan kondisi. Personel paling banyak ditempatkan untuk bertugas pada masa kampanye dan hari H pemilihan. Personel tambahan berjumlah 1207 orang yang merupakan BKO Polda berasal dari Brimob dan Sabhara serta 200 orang yang berasal dari BKO Mabes.

6. Pemaparan Pangdam XVI Pattimura

Pangdam XVI Pattimura siap membantu pemerintah daerah dan kepolisian sesuai amanat UU No. 34 Tahun 2004 selama ada permintaan bantuan dari Polda. Terkait anggaran TNI untuk pelaksanaan pengamanan pilkada serentak 2018 belum siap. Jumlah personel yang dapat dikerahkan untuk membantu Polda berjumlah kurang lebih 4.000 s/d 4.400 orang. Pelaksanaan Gakkumdu selama ini berjalan dengan baik terutama terkait pelaksanaan pilkada serentak 2018.

III. Hal-Hal yang menjadi Perhatian Anggota Komisi II DPR RI

1. Permasalahan e-KTP ganda dan kesulitan dalam proses pembuatan e-KTP.
2. Permasalahan batas wilayah di Kabupaten Maluku tengah dan Kabupaten Seram Bagian Barat perbatasan antara Kecamatan Leihitu dan Kecamatan Leihitu Barat serta di daerah Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru Selatan.
3. Persiapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Sementara (DPS) mengingat pilkada 2018 dilaksanakan seminggu setelah hari raya. Hal ini, penting untuk memastikan setiap orang telah terdaftar menjadi pemilih.
4. Kebutuhan anggaran TNI untuk pengamanan pilkada serentak 2018 sebesar 101 milyar yang jauh lebih besar dibanding penyelenggara pilkada lainnya (KPU dan Bawaslu/Panwaslu) yang perlu dilakukan sinkronisasi.
5. Penegakan Gakkumdu harus memperhatikan batas waktu (sengketa) sesuai dengan UU/aturan yang berlaku.

IV. PENUTUP

Demikian laporan hasil kunjungan kerja Komisi II DPR RI di Provinsi Maluku pada tanggal 19 September 2017. Semoga dapat ditindaklanjuti dan bermanfaat bagi semua pihak. Kepada semua pihak yang membantu terselenggaranya kunjungan spesifik ini, kami ucapkan terima kasih.